



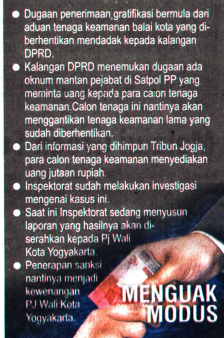
Tenaga Keamanan Mendadak Diberhentikan

■ Dugaan Suap Penerimaan Pekerja di Balai Kota

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mengendus adanya praktik gratifikasi dalam proses penerimaan tenaga kerja di lingkungan Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal tersebut terkuak setelah beberapa eks personel Satpol PP mengadu kepada anggota dewan, karena mendadak diberhentikan dari pekerjaannya.

Antonius Fokki Ardiyanto, salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta yang menerima aduan itu, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran lebih jauh. Dijelaskan, adu-

● ke halaman 11



Tenaga Keamanan

● Sambungan Hal 1

an dari eks tenaga keamanan di kompleks Balai Kota Yogyakarta tersebut sudah diterima pihaknya sejak kisaran bulan Maret 2023. "Dari hasil investigasi dan komunikasi itu, ternyata terdapat puluhan orang tenaga pengamanan di Balai Kota Yogya juga mengalami hal yang sama. Mereka diberhentikan," jelasnya, Jumat (19/5).

Fokki memaparkan, pihaknya melakukan upaya penelusuran untuk menindaklanjuti sejumlah laporan tersebut selama Maret-Mei 2023. Sehingga, ia dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ada dugaan atau indikasi praktik gratifikasi yang dilakukan salah satu oknum pejabat Satpol PP Kota Yogyakarta. "Tetapi, sekarang yang bersangkutan sudah dimutasi ke instansi lain dan kasus tersebut sudah diperiksa jajaran Inspektorat Kota Yogya," cetusnya.

Adapun modus dugaan praktik gratifikasi itu adalah, oknum pejabat tersebut meminta uang pada beberapa calon pekerja yang berminat menjadi tenaga keamanan di Balai Kota. Jika bersedia dan menyetujui pembayaran dalam nominal tertentu, mereka bakal menggantikan para personel yang diputus sepi-

hak melalui jasa pihak ketiga. "Berdasarkan data yang kami verifikasi, kebanyakan mereka yang dimintai uang untuk masuk jadi petugas keamanan, KTP-nya luar Kota (Yogyakarta)," urainya.

Walau begitu, Fokki tidak menyampaikan berapa nominal yang diminta oleh oknum pejabat itu sebagai syarat menjadi tenaga keamanan di Balai Kota. Namun, berdasarkan keterangan yang dihimpun *Tribun Jogja* dari sejumlah sumber, pemohon harus membayar antara Rp10-20 juta dan meneken kontrak selama 1 tahun.

Sebagai informasi, perekutan tenaga keamanan di kompleks Balai Kota Yogyakarta sejatinya menggunakan pihak ketiga atau *outsourcing*, yang ditunjuk melalui proses lelang. Hanya saja, satu oknum pejabat Satpol PP tersebut diduga mempunyai kekuasaan untuk melakukan intervensi dan bisa leluasa mengajukan nama-nama calon pekerjaannya. "Sekarang indikasinya sudah semakin kuat. Jadi, kami menuntut Inspektorat supaya bersikap profesional, ya, jangan mandul. Hasil investigasinya sampaikan ke publik," terang politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, ia pun mendesak Pemkot Yogyakarta, melalui Inspektorat, agar memanggil dan meminta keterangan para pekerja yang telanjur

diberhentikan oleh oknum pejabat Satpol PP tersebut. Bagaimanapun, lanjutnya, hak-hak mereka sebagai seorang tenaga kerja yang dilindungi undang-undang wajib dipenuhi. "Kalau ini tidak dilakukan oleh pihak inspektorat dan pemangku kebijakan yang lain, maka saya selaku wakil rakyat akan melakukan aksi-aksi lainnya, ya, selaras perundang-undangan," pungkaskannya.

Periksa

Merespons temuan tersebut, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arifad menuturkan, kasus itu telah ditangani jajaran Inspektorat. Menurutny, pelimpahan kasus ke Inspektorat ini merupakan arahan, atau mandat dari Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta. Sumadi, beberapa waktu lalu.

"Karena ini persoalan bukan hanya satu atau dua orang, jadi supaya diselesaikan secara tim di Pemkot Yogya. Maka, Pak PJ mengambil langkah, semua ke Inspektorat saja," tuturnya, Jumat (19/5). "Biar tidak terputus, karena waktu itu saya masih pejabat sementara, belum tahu siapa definitifnya, ya, karena baru akhir Februari 2023 kemarin saya dilantik (menjadi Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta)," imbuh Octo.

Sebagai informasi, sebelum menjabat Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta secara

definitif, ia sempat diberi amanat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) mengisi posisi Agus Winarto yang berpulang 10 Oktober 2022 silam. Octo pun tak menampik, selama menjabat Plt, dirinya beberapa kali menerima aduan menyoal dugaan praktik gratifikasi tersebut.

"Selama jadi Plt sempat satu instansi dengan yang bersangkutan pun tak menerima yang diduga jadi pelaku gratifikasi, tapi kemudian dimutasi, bareng dengan pelantiknya saya, akhir Februari," cetusnya. "Cukup banyak selama saya Plt yang menyampaikan *problem-problem* itu. Kalau ada bukti, silakan saja itu disampaikan dan kita selesaikan secara kedinasan sesuai ketertuannya," tambah Octo.

Oleh sebab itu, ia pun mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses perekrutan tenaga keamanan kompleks Balai Kota itu segera melaporkan kepada Inspektorat. Dengan begitu, sangkar polemik bisa terurai secara utuh, lantaran sejak awal kasus ditangani langsung oleh jajaran Inspektorat. "Inspektorat sudah bergerak sejak sebelum saya masuk ke sana (Satpol PP). Intinya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan oleh Pemerintah Kota Yogya, atau dalam hal ini Satpol PP, karena kita hadir untuk memberikan solusi, bukannya masalah," ujar Octo. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005